JURNAL POLITIQUE

Jurnal Prodi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Sunan Ampel Surabaya

Vol. 2 No. 1 Januari 2022

Implementasi Penataan Toko dan Pemberdayaan Pasar Tradisional

(Studi Kasus di Alfamart, Alfamidi, Indomaret, dan Pasar Bronggalan, Kelurahan Pacar Kembang Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya)

Ayunda Citra Lestari

(Program Studi Ilmu Politik, FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya)

Abstrak

Fenomena yang terjadi adalah banyaknya pasar modern yang berada dekat dengan Pasar Bronggalan, Kelurahan Pacar Kembang, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara aktual dan faktual tentang pelaksanaan pemberdayaan pasar modern dan pasar tradisional, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pemberdayaan pasar modern dan pasar tradisional. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif studi kasus dengan menggunakan satu variabel, yaitu Pelaksanaan Pemberdayaan Pasar Modern dan Pasar Tradisional (Studi Kasus pada Alfamart, Alfamidi, Indomaret, dan Pasar Bronggalan Kelurahan Pacar Kembang Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya). Hasil penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan pemberdayaan pasar modern dan pasar tradisional dipengaruhi oleh enam faktor antara lain: standar atau ukuran kebijakan; komunikasi; sumber daya; disposisi; struktur birokrasi; serta kondisi sosial, ekonomi dan politik. Faktor pendukung pelaksanaan kebijakan pemberdayaan pasar modern (Alfamart, Alfamidi, Indomaret) serta pasar tradisional (Pasar Bronggalan) adalah adanya koordinasi Dinas Perdagangan Kota Surabaya dan PD Pasar Surya Surabaya serta adanya pemerataan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kesadaran yang rendah dan pengawasan yang kurang memadai.

Kata Kunci: Implementasi; Pengaturan; Pemberdayaan; Pasar Modern; Pasar Tradisional

Pendahuluan

Kompetisi dan persaingan toko modern dan pasar tradisional mengalami peningkatan setelah reformasi. Perkembangan toko modern ini pada awalnya dapat ditemui di sekitar akses jalan utama di Kota Surabaya. Sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, Kota Surabaya juga tidak terlepas dari maraknya pendirian toko modern. Kehadiran para pelaku usaha toko modern memberikan warna tersendiri bagi perkembangan industri perdagangan di Indonesia. Mereka mewujudkan toko modern dalam bentuk yang bermacam-macam, misalnya *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, dan toko grosir yang tersebar di setiap kota besar Indonesia, termasuk Kota Surabaya. Dalam Peraturan daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern, pasar adalah area tempat jual beli barang dan/atau tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pasar tradisional maupun pasar modern atau pusat perbelanjaan, pertokoan, perdagangan maupun sebutan lainnya. Namun, sangat disayangkan bahwa keberadaan pasar modern juga menjadi ancaman bagi Pemerintah Kota Surabaya karena dapat mematikan pasar tradisional seperti UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), toko kelontong, bahkan pasar tradisional menjadi sepi peminat karena pasar modern telah menjual hampir seluruh barang yang tersedia di pasar tradisional, contohnya sembako dan sayur-sayuran.

Berdasarkan data dari Dinas Perdagangan Kota Surabaya, hingga saat ini sudah berdiri ratusan toko modern yang tersebar di berbagai tempat. Banyaknya toko modern di Kota Surabaya yang belum memiliki Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) menjadi masalah tersendiri yang harus segera diselesaikan. Aturan jarak antar toko swalayan seperti Alfamart, Alfamidi, Indomaret dan pasar tradisional seperti Pasar Bronggalan kini menjadi sorotan. Padahal dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 Bab II Pasal 3, dijelaskan bahwa pemerintah mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro kecil dan menengah, serta koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata. Dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya, jarak antara toko modern dengan pasar tradisional yaitu sejauh 500 meter. Namun realitasnya, ada beberapa peraturan yang dilanggar, dengan banyaknya toko modern (Alfamart, Alfamidi, dan Indomaret) yang telah masuk di gang-gang kecil.

Dengan ditemukannya fakta tersebut, kompetisi yang mungkin muncul antara toko modern dan pasar tradisional akan mengancam eksistensi dari pedagang pasar tradisional itu sendiri. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya berbagai macam pekerjaan, yang diantaranya adanya tukang ojek, tukang becak, pedagang, jasa angkut barang, dan lain sebagainya. Dari sini bisa dilihat bahwa pasar tradisional menjadi tempat berlangsungnya roda perekonomian sebagian besar masyarakat. Dengan kemampuan modal yang terbatas serta manajemen yang sangat sederhana, membuat tingkat persaingan mereka dengan toko modern menjadi tidak seimbang karena toko modern memiliki sedikit keunggulan dibandingkan pasar tradisional. Akibatnya, pasar tradisional yang telah lama menjadi pusat perputaran ekonomi masyarakat pedesaan hingga perkotaan akan hilang dan lapangan pekerjaan pun akan ikut terdampak.

Masalah-masalah yang berkaitan dengan Implementasi Penataan Toko Modern dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Studi Kasus di Alfamart, Alfamidi, Indomaret dan Pasar Bronggalan, Kelurahan Pacar Kembang Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya) diantaranya: (1) peraturan yang belum optimal, terbukti dari keberadaan dan pendirian toko modern dan pasar tradisoonal di kawasan Bronggalan yang saling berdekatan; (2) masih banyak toko modern yang sudah masuk di gang kecil, sehingga kemampuan modal yang sangat terbatas serta manajemen yang sederhana membuat pasar tradisional sulit bersaing dengan toko modern yang memiliki sedikit keunggulan dibanding pasar tradisional; (3) koordinasi dan sosialisasi antar dinas berkaitan dengan perencanaan pemberdayaan pasar tradisional masih belum maksimal; (4) kajian sosial ekonomi masyarakat yang perlu dilakukan di daerah setempat, agar dapat diketahui kondisi langsung masyarakat di sekitar pasar modern serta pasar modern yang harus memiliki Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Dari permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka dibutuhkan suatu alat untuk menganalisis Implementasi Penataan Toko Modern dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Studi Kasus di Alfamart, Alfamidi, Indomaret, dan Pasar Bronggalan, Kelurahan Pacar Kembang Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya) untuk mengukur kebijakan ini sudah berjalan dengan baik atau tidak. Karena sebuah penelitian tidak hanya untuk menemukan titik terang atau untuk membatasi analisis, melainkan harus diimbangi dengan teori yang berkaitan dengan masalah di lapangan.

Landasan Teori

Implementasi kebijakan termasuk dalam pembuatan keputusan seperti halnya pasal-pasal dalam sebuah undang-undang legislatif, keluarnya keputusan pengadilan, keluarnya keputusan

eksekutif, dan peraturan-peraturan di lingkup masyarakat yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan. Tidak semua kebijakan diambil sesuai sasaran, jika gagal mencapai suatu tujuan maka kebijakan tidak akan berjalan baik dan optimal.¹ Easton dalam pemikirannya mengungkapkan bahwa kebijakan publik sebagai “*the authoritative allocation of values for the whole society*”. Pengertian ini menegaskan bahwa hanya pemilik kekuasaan dalam sistem politik (pemerintah) yang diakui dapat melakukan sesuatu pada masyarakatnya, dan pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam pengalokasian nilai-nilai. Para pemegang kekuasaan dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan politik sehari-hari dan memiliki tanggungjawab masalah, dimana pada satu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat dalam waktu yang ditetapkan.²

Mengikuti teori kebijakan publik Van Meter dan Van Horn, mereka memformulasikan adanya enam variabel yang mempengaruhi hasil implementasi kebijakan, yaitu:³

1. Standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan. Pada kasus tertentu, standar dan tujuan kebijakan dirumuskan dengan jelas dan detail serta mudah diukur. Tetapi pada kasus lain, tujuan dan standar kebijakan ini tidak dirumuskan dengan jelas dan detail serta sulit diukur.
2. Sumber daya. Implementator merupakan bagian dari sumber daya, baik dari perseorangan, kewenangan, keuangan, maupun kelengkapan fasilitas. Apabila tujuan, isi, dan sasaran kebijakan sudah disusun secara konsisten dan jelas tapi terkendala kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, maka pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan dengan baik. Kebijakan pemerintah hanya tinggal angan-angan tanpa perwujudan dalam memecahkan masalah yang ada di masyarakat dan tidak adanya perwujudan pemberian pelayanan kepada masyarakat.
3. Komunikasi. Komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi kebijakan, sebab harus mengetahui apa yang akan dikerjakan. Implementator memiliki tanggungjawab dalam proses implementasi kebijakan agar dapat berjalan dengan maksimal. Maka, perintah yang harus disampaikan harus stabil, jelas dan akurat kepada implementator baik itu masyarakat, pedagang, maupun penguasa.

¹ Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*, Cetakan Pertama. Gorontalo: UNG Press.

² Agustino, L. (2009). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta

³ Nugroho, H. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

4. Disposisi implementator. Disposisi diartikan sebagai sikap pelaksana terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diimplementasikan. Etika pelaksana kebijakan tidak selalu beriringan dengan pembuat kebijakan, pandangan pun bisa berbeda. Namun bagaimana cara pelaksana kebijakan melihat kebijakan memiliki dampak yang baik atau tidak bagi kepentingan perorangan dan organisasi mereka.
5. Karakter lembaga pelaksana. Meskipun komunikasi diantara pembuat kebijakan dan implementator sudah terlaksana dengan baik serta sumber daya yang mencukupi, akan tetapi masih ada hambatan terkait dengan in-efisiensi struktur birokrasi, maka kebijakan tidak berjalan dengan efektif.
6. Kondisi sosial, ekonomi dan politik. Kondisi sosial, ekonomi dan politik merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Kondisi sosial perlu diperhatikan sebab dalam pelaksanaannya harus tepat sasaran agar dapat tercipta keberhasilan kebijakan publik tersebut. Sumber daya ekonomi juga sangat penting dan dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan. Kelompok kepentingan dalam masyarakat perlu diperhatikan dengan teliti dalam formulasi kebijakan maupun implementasi kebijakan.⁴

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi kasus. Dalam jurnal ini, penulis menentukan lokasi yang sesuai dengan judul yaitu di wilayah Bronggalan, Kelurahan Pacar Kembang, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya. Peneliti mengambil lokasi penelitian di daerah tersebut karena banyak terdapat toko modern dan pasar tradisional yang berdekatan di kawasan tersebut, sehingga memunculkan iklim kompetisi yang kuat.

Kebutuhan data informan penelitian dipilih secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah informan yang dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data untuk mengungkap semua realita yang mencakup variabel yang akan diteliti oleh peneliti. Data yang akan didapatkan oleh peneliti adalah rekaman hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dokumentasi foto, serta catatan yang sudah ditulis oleh peneliti sewaktu mewawancarai informan.

⁴ Kasmad, R. (2013). *Studi Implementasi Kebijakan Publik* (Makassar: Kedai Aksara, 2013).

Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, guna melakukan pemeriksaan keabsahan data. Teknik triangulasi merupakan sebuah teknik pemeriksaan data yang menggunakan data-data terkait untuk dikolaborasikan dengan realita yang didapatkan. Lebih spesifik lagi, teknik penulisan akan menggunakan teknik umum yang lazim dipakai dari berbagai penelitian. Triangulasi data ini diaplikasikan dengan cara mengkorelasikan hasil wawancara yang diperoleh dengan data dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

Dalam pelaksanaan penataan toko modern dan pemberdayaan pasar tradisional, Dinas Perdagangan Kota Surabaya berusaha untuk merealisasikannya dengan memberikan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) dan Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS). Beberapa program yang dijalankan yaitu mengenai pengembangan industri mikro kecil dan menengah, berupa pemberian fasilitas pemasaran, sosialisasi, pelatihan, pengembangan potensi, pembinaan dan pendanaan, dengan salah satunya menjalin kemitraan dengan toko modern. Toko modern menyediakan ruang sebesar 2,5% dari penjualannya untuk produk usaha dari UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) di pasar tradisional. Diharapkan program ini menjadi poros utama ekonomi masyarakat dan persaingan daya jual beli masyarakat masih tetap terjaga. Produk dari pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berusaha untuk dikembangkan lebih jauh dan maju. Yang tak kalah penting juga dapat dijadikan pembinaan atau bekal pengetahuan agar pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) siap menghadapi tantangan ekonomi dunia tentang persaingan bebas yang semakin meluas.

Kebijakan merupakan rangkaian tindakan yang mencakup konsekuensi-konsekuensi yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh seseorang maupun kelompok ataupun pemerintah, yang berisikan keputusan untuk menggapai suatu tujuan (Budi Winarno, 1989: 17). Teori implementasi Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa proses implementasi merupakan abstraksi atas dikeluarkannya suatu kebijakan yang pada dasarnya dilaksanakan untuk mendapatkan kinerja pelaksanaan kebijakan yang tinggi, dalam hubungan variabel-variabel tertentu dan menjadi tolak ukur keberhasilan kebijakan tersebut. Model ini mengindikasikan bahwa kebijakan berjalan beriringan dengan keputusan politik. Pelaksana dan kebijakan publik dipengaruhi oleh ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi dan penggunaan paksaan, disposisi implementator, karakter lembaga pelaksana, serta kondisi sosial ekonomi dan politik.

Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Penataan Alfamart, Alfamidi, Indomaret, dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Bronggalan Kelurahan Pacar Kembang Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya

Faktor pendukung adalah faktor penunjang kebijakan sehingga kebijakan terealisasi dengan semestinya. Dalam penelitian ini, penataan Alfamart, Alfamidi, Indomaret dan Pemberdayaan Pasar Bronggalan didukung oleh koordinasi Dinas Perdagangan Kota Surabaya dan PD Pasar Surya Surabaya dan adanya pemerataan. Koordinasi merupakan hal paling terpenting dalam menjalankan suatu kebijakan publik agar mendapatkan arahan, informasi, serta mengatur program kerja yang sesuai. Dalam hal ini, Dinas Perdagangan Kota Surabaya dan PD Pasar Surya Surabaya melaksanakan kebijakan dalam bentuk pendataan, pembinaan dan sosialisasi. Pertama, pendataan pedagang Pasar Bronggalan dan pelaku usaha Alfamart, Alfamidi dan Indomaret di wilayah Bronggalan. Data merupakan atribut yang melekat pada objek tertentu, yang berfungsi untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan didapatkan melalui metode pengumpulan data (Haris Herdiansyah, 2013:8). Pendataan dilakukan oleh pihak Kecamatan Tambaksari, yang selanjutnya akan diserahkan kepada Dinas Perdagangan Kota Surabaya dan PD Pasar Surya Surabaya. Data yang dikumpulkan selanjutnya digunakan untuk melaksanakan sosialisasi dan pembinaan.

Kedua, sosialisasi dan pembinaan pedagang Pasar Bronggalan oleh Dinas Perdagangan Kota Surabaya dan PD Pasar Surya Surabaya. Menurut Maclever, sosialisasi merupakan tindakan untuk mempelajari norma, nilai peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk keefektifan partisipasi dalam lingkup sosial. Implementasi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Surabaya dan PD Pasar Surya Surabaya bertujuan agar para pedagang Pasar Bronggalan dan pelaku usaha toko modern seperti Alfamart, Alfamidi dan Indomaret Bronggalan menaati peraturan yang berlaku dan tidak merugikan satu sama lain, serta mendapatkan pembinaan berupa pelatihan kepada pedagang Pasar Bronggalan agar semakin berkembang.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Penataan Toko Modern Alfamart, Alfamidi, Indomaret, dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Bronggalan Kelurahan Pacar Kembang Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya

Faktor penghambat implementasi kebijakan penataan toko modern Alfamart, Alfamidi, Indomaret, dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Bronggalan Kelurahan Pacar Kembang Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya yaitu kesadaran pelaku usaha dan pedagang pasar yang

masih kurang, serta pengawasan dari pihak yang berwenang masih belum optimal. Faktor penghambat pertama adalah kesadaran para pedagang Pasar Bronggalan yang rendah, terkait dengan penggunaan fasilitas publik untuk berjualan yang mana trotoar digunakan sebagai tempat berjualan. Mereka sudah menganggap berjualan di trotoar yang notabene fasilitas publik merupakan hal biasa yang lumrah. Para pedagang pasar Bronggalan tidak mau kembali ke Pasar Kapas Krampung Surabaya yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Sebenarnya, para pedagang mengetahui jika tempat yang digunakan untuk berjualan menyalahi aturan pemerintah daerah, namun hal tersebut terpaksa diabaikan oleh para pedagang. Begitu juga dengan pelaku usaha toko modern Alfamart, Alfamidi, Indomaret di kawasan Bronggalan yang pengaturan jaraknya menyalahi jarak minimal yang ditetapkan oleh peraturan daerah. Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Pasar Swalayan di Kota Surabaya, jarak antara toko modern dengan pasar tradisional paling sedikit 500 meter. Di sisi lain, kerjasama kemitraan toko modern dengan pasar tradisional dengan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) belum terwujud.

Hal tersebut menunjukkan kesadaran pedagang Pasar Bronggalan dan pelaku usaha Alfamart, Alfamidi, Indomaret dan Pasar Bronggalan belum terpenuhi. Mereka masih kurang memahami akan aturan yang berlaku mengenai pelanggaran terhadap penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi, serta jarak lokasi pendirian toko modern dan toko tradisional yang tidak dilaksanakan dengan baik. Sehingga, hal ini dapat menghambat implementasi penataan toko modern Alfamart, Alfamidi, Indomaret dan Pasar Bronggalan di Kelurahan Pacar Kembang Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.

Kesimpulan

Implementasi kebijakan penataan toko modern dan pasar tradisional dianalisis dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn relevan dengan permasalahan terkait Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Pasar Bronggalan yang dikategorikan dalam variabel yang saling berkaitan. Variabel-variabel tersebut yakni standar ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik badan, komunikasi, sikap para pelaksana/disposisi, serta lingkungan ekonomi sosial dan politik.

Upaya perlindungan yang diberikan kepada pasar rakyat, usaha mikro kecil dan menengah sejenis tidak efektif akibat adanya persaingan yang kurang sehat antara pasar tradisional dengan toko modern. Akibatnya, justru mengurangi jumlah konsumen yang datang dan menurunkan jumlah pendapatan terhadap usaha tradisional, sehingga belum terjadi sinergi

antara usaha tradisional dengan toko modern untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, kurangnya pengawasan dari Dinas Perdagangan Kota Surabaya menyebabkan kegiatan pembinaan toko kelontong masih belum juga dilakukan.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Jawa Timur tidak cukup memberikan penyelesaian masalah, terutama bagi pasar tradisional dan usaha toko kelontong masyarakat. Dengan semakin mudahnya pengusaha toko modern dan minimarket untuk mendapatkan permohonan IUTS, berpotensi menyebabkan pertambahan minimarket yang semakin besar sehingga dapat mengganggu eksistensi usaha tradisional dan toko kelontong milik masyarakat. Selain itu juga terkait dengan lokasi pendirian toko modern dan minimarket yang belum sesuai persyaratan, maka Dinas Perdagangan Kota Surabaya tidak serta merta menutup usaha tersebut, karena pengusaha yang bernegosiasi untuk meminta waktu hingga 2,5 tahun sampai menunggu balik modal.

Tidak meratanya manfaat yang dirasakan adalah akibat dari adanya pembatasan jam minimarket, sehingga mempengaruhi penyerapan tenaga kerja lokal yang berimbas kepada pengurangan jumlah pegawai yang bekerja di minimarket. Akibat dari pengurangan jumlah pegawai tersebut, menyebabkan meningkatnya pengangguran sehingga tidak bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

Agustino, L. (2009). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.

Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka

Utama. Dunn, William N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UGM Press, 2003.

Herdiansyah, H. (2013). *Wawancara Observasi dan Fokus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.

Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*, Cetakan Pertama. Gorontalo: UNG Press.

- Kasmad, R. (2013). *Studi Implementasi Kebijakan Publik* (Makassar: Kedai Aksara, 2013).
- Keban, Y. T. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Khrisna, R. (2016). *Analisis Keefektifan Instrumen Kebijakan Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya (Studi Tentang Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014)*, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Vol. 4 No. 2 Mei-Agustus.
- Kurniasih, D. (2014). *Controlling and Supervising the Development of Modern Market in Social Justice Perspective (A Case Study in Banyumas Regency)*, International for Regional Public Management ICPM.
- Moeloeng, L. J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, H. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Van Meter dan Van Horn, D. d. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework Administration and Society*.
- Winarno, B. (1989). *Teori Kebijakan Publik* (Pusat Antara Universitas Studi Sosial, Universitas Gadjad Mada, Yogyakarta).
- Yulia, A. S (2018). *The Role of Traditional Market in Supporting Economic Development in Surakarta: Case Study on Klewer Market in Surakarta, International Seminar on Education and Development of Asia 1st INseIDEA* ISBN: 978-602-5614-24-8.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan Penataan Pasar Modern